



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA (LKj) BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2022



BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
2023



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KINERJA
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
TAHUN 2022**

**BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas ridhonya, Laporan Kinerja (LKj) Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. LKj Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Biro Perencanaan dan Keuangan terhadap *stakeholders* atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja dalam rangka mencapai sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Biro Perencanaan dan Keuangan 2020-2024. Di samping itu, LKj Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022 disusun untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari sasaran dan indikator kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022. Penyusunan laporan ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang capaian kinerja yang telah diwujudkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan dalam mendukung kinerja organisasi Sekretariat Kabinet selama tahun 2022.

Harapannya, laporan ini dapat menjadi rujukan bagi pejabat/pegawai di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam mengevaluasi dan memperbaiki kinerja, serta menjadi bahan acuan dalam menyusun program di masa mendatang agar lebih efektif, efisien, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jakarta, Januari 2023

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,

Djaka Warsijanto

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022 menyajikan keberhasilan capaian sasaran strategis Biro Perencanaan dan Keuangan serta hal yang perlu diperbaiki. Pencapaian sasaran strategis tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan sasaran. Pada tahun 2022 Biro Perencanaan dan Keuangan telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang keberhasilan capaiannya diukur melalui penetapan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hal tersebut, seluruh program dan kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis), Rencana Kerja, serta Penetapan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan.

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022 sebesar 105,72%, dengan 5 (lima) indikator memperoleh capaian dengan kategori “Memuaskan”. Capaian kinerja dikategorikan “Memuaskan” jika capaian $\geq 100\%$. Sedangkan capaian kinerja didefinisikan “Sangat Baik” jika capaian berada pada rentang capaian $85\% \leq 99\%$. Rincian capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran 1			
1. Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	78%	85,16%	109,18%
Sasaran 2			
1. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	100%	100%
2. Persentase Penyelesaian Penerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan secara akurat	96%	97%	102%
Sasaran 3			
1. Persentase Tingkat Pemanfaatan Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Kabinet	80%	83,17%	103,96%
2. Persentase Kepuasan Unit Kerja Terhadap Layanan Revisi Anggaran	80%	88,35%	110,43%

RINGKASAN EKSEKUTIF

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Belum adanya Sistem Aplikasi yang dapat mendeteksi adanya permasalahan dan memantau sejauh mana proses penyusunan program kerja, RAB, dan KAK.
2. Unit kerja masih belum sepenuhnya memahami siklus, proses dan teknis penyusunan perencanaan program dan anggaran
3. Penyampaian program kerja, RAB, dan KAK oleh unit kerja tidak tepat waktu.
4. Kekurangtelitian dalam penyusunan RAB, antara lain ketidakselarasan antara dokumen KAK dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan data dukung lainnya, RAB belum sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM), kesalahan perhitungan pada harga satuan maupun total, kurs dollar yang belum disesuaikan dengan data terkini, dan penggunaan akun belum sesuai dengan peruntukannya.
5. Masih terdapat kendala pada penggunaan aplikasi SAKTI.
6. Aplikasi KRISNA belum terintegrasi secara sempurna dengan aplikasi SAKTI.
7. Regulasi terkait perencanaan mengalami perubahan yang dinamis secara terus menerus.
8. Para pengelola keuangan belum sepenuhnya memahami ketentuan terkait pelaksanaan anggaran khususnya penyelesaian Surat Perintah Membayar (SPM).
9. Belum adanya sistem informasi yang dapat mengakomodasi pelaporan capaian pelaksanaan anggaran kepada Biro Perencanaan dan Keuangan. Hal ini berdampak pada verifikasi data capaian yang membutuhkan waktu lebih lama.
10. Belum adanya sistem informasi terkait penganggaran yang dapat mengakomodasi usulan revisi anggaran internal Sekretariat Kabinet. Hal ini menyebabkan proses revisi anggaran membutuhkan waktu lebih lama dan potensi *human error* yang lebih besar akibat miskalkulasi, perbedaan dasar RAB revisi dan perbedaan alokasi blokir.
11. Perubahan tata cara revisi anggaran serta dilakukannya *Automatic Adjustment* sebanyak 2 (dua) kali dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022 sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2022 sebagai dampak pandemi Covid-19 dan meningkatnya ketidakpastian perenonomian global.
12. Beberapa unit kerja mengajukan dokumen usulan revisi tidak sesuai dengan format usulan revisi yang seharusnya, sehingga proses revisi anggaran membutuhkan waktu yang lebih lama, karena dokumen usulan revisi harus disesuaikan terlebih dahulu dengan format yang seharusnya.
13. Narahubung yang melaksanakan pelaporan pelaksanaan anggaran dan revisi anggaran pada sebagian besar unit kerja berbeda dengan narahubung yang

RINGKASAN EKSEKUTIF

menyusun perencanaan anggaran, sehingga seringkali terjadi pelaporan pelaksanaan anggaran dan revisi anggaran tidak sinkron dengan perencanaan anggaran.

Langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan adalah:

- 1 Perlu dibangun Sistem Informasi di Sekretariat Kabinet yang terintegrasi terkait perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi program, kegiatan dan anggaran.
- 2 Perlu adanya pengembangan aplikasi SIKT (Sistem Informasi Kinerja Terpadu) untuk dapat mengakomodir penginputan capaian kinerja sesuai renja secara periodik setiap bulan, dan diintegrasikan dengan SIPT (Sistem Informasi Persuratan Terpadu) untuk menghitung capaian kinerja unit kerja secara tersistem sehingga proses penghitungan capaian kinerja anggaran bisa lebih cepat.
- 3 Berkoordinasi dengan baik secara internal di Biro Perencanaan dan Keuangan maupun secara eksternal dengan seluruh unit kerja di Sekretariat Kabinet agar seluruh tugas dan fungsi dapat berjalan dengan lancar. Koordinasi dilakukan mulai dari tahap perencanaan dengan mengomunikasikan alur proses perencanaan, melakukan pendampingan, serta termasuk perlunya ditunjuk satu orang penanggungjawab dari tiap unit kerja untuk menangani pelaporan pelaksanaan anggaran dan revisi anggaran sehingga menjadi satu jalur dan memudahkan untuk monitoring.
- 4 Meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya di luar lingkungan Sekretariat Kabinet.
- 5 Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan lebih intensif kepada koordinator/penanggung jawab/Fasilitasi Operasional anggaran dan pelaksana teknis unit kerja terkait perencanaan program dan anggaran, pelaporan pelaksanaan anggaran dan kebijakan revisi anggaran.
- 6 Melaksanakan bimbingan teknis kepada para pengelola keuangan terkait penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
- 7 Melaksanakan diseminasi informasi ataupun ketentuan teknis terkait penyelesaian Surat Perintah Membayar (SPM) kepada para pengelola keuangan.

RINGKASAN EKSEKUTIF

- 8 Menginformasikan kepada unit kerja tentang mekanisme pengajuan revisi anggaran beserta dokumen kelengkapan lainnya melalui memorandum sehingga terdapat kesamaan format dokumen pengajuan revisi oleh unit kerja.
- 9 Meningkatkan kapasitas/pengetahuan pegawai pada Biro Perencanaan dan Keuangan dengan mengikuti sosialisasi/bimtek terkait agar dapat memberikan pendampingan yang optimal kepada unit kerja terkait penyusunan perencanaan program dan anggaran serta pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas, sehingga dapat tepat sasaran dan bermanfaat oleh unit kerja.
- 10 Melakukan penyebarluasan informasi kepada unit kerja melalui Surat Edaran dan Memorandum.
- 11 Menyusun petunjuk teknis proses dan siklus penyusunan program dan anggaran.

Realisasi anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.382.184.903,- atau 99,49% dari pagu setelah revisi terakhir Rp1.389.281.000,-. Persentase realisasi anggaran tersebut diiringi dengan capaian kinerja total sebesar 105,72%, capaian kinerja tersebut masuk ke dalam kategori memuaskan. Realisasi anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2021 (84,48%). Kondisi ini didukung dengan membaiknya kondisi pandemi Covid-19 di tahun 2022 yang memudahkan pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran unit kerja, termasuk Biro Perencanaan dan Keuangan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan	2
C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis	6
B. Perjanjian Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
A. Capaian Kinerja.....	10
B. Analisis Penggunaan Sumber Daya	39
BAB IV PENUTUP	44
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	7
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	8
Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2022.....	11
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2022	12
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2022	13
Tabel 3.4 Hasil Penilaian Responden pada Sasaran 1 Tahun 2022	16
Tabel 3.5 Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran Sasaran 1 Tahun 2022	19
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran 2.1 Tahun 2022.....	21
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran 2.1 Tahun 2018-2022	22
Tabel 3.8 Penyampaian Laporan Keuangan	23
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran 2.2 Tahun 2022.....	24
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Sasaran 2.2 Tahun 2021-2022.....	25
Tabel 3.11 Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran Sasaran 2 Tahun 2022	26
Tabel 3.12 Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2022.....	28
Tabel 3.13 Capaian <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> Sasaran 3 Tahun 2022.....	29
Tabel 3.14 Capaian Kinerja Sasaran 3.1 Tahun 2022	30
Tabel 3.15 Capaian Kinerja Sasaran 3.2 Tahun 2022	33
Tabel 3.16 Revisi Anggaran Unit Kerja Tahun 2022.....	34
Tabel 3.17 Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran Sasaran 4 Tahun 2022	37
Tabel 3.18 Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2022	40
Tabel 3.19 Sumber Daya Manusia Lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan.....	40

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2018-2022	14
Grafik 3.2 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran pada Sasaran 1 Tahun 2018-2022	20
Grafik 3.3 Capaian Kinerja Sasaran 3.1 Tahun 2018-2022	31
Grafik 3.4 Capaian Kinerja Sasaran 3.2 Tahun 2018-2022	34
Grafik 3.5 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran pada Sasaran 3 Tahun 2018-2022	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan.....	3
Gambar 1.2 Analisis SWOT Biro Perencanaan dan Keuangan.....	5
Gambar 2.1 Visi dan Misi Sekretariat Kabinet.....	6
Gambar 2.2 Tujuan Sekretariat Kabinet Poin 4.....	7
Gambar 3.1 Kategori Pencapaian Kinerja.....	11
Gambar 3.2 Tangkapan Layar <i>Dashboard</i> SIKT2 2021	12
Gambar 3.3 Kriteria Penilaian Capaian Kinerja	15
Gambar 3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3.1.....	30
Gambar 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3.2.....	32

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai perwujudan upaya penyelenggaraan *good governance*, Pemerintah menerbitkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyelenggaraan SAKIP meliputi perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja.

Dalam rangka melaksanakan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tersebut, Sekretariat Kabinet yang mempunyai tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja. Penyusunan LKj ini juga merupakan perwujudan Sekretariat Kabinet sebagai instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan.

Biro Perencanaan dan Keuangan, berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, merupakan salah satu unit kerja bawah Deputy Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet. Dengan demikian, sebagai sebuah entitas akuntabilitas kinerja unit kerja (Eselon II), Biro Perencanaan dan Keuangan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja (Kepala Biro) kepada Pimpinan Unit Organisasi (Deputi), dalam hal ini Deputy Bidang Administrasi.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022 ini diharapkan dapat menunjang evaluasi akuntabilitas kinerja, menjadi acuan penyempurnaan perencanaan kinerja, dan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang agar kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan secara keseluruhan dapat terus menuju ke arah perbaikan.

B. Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, yang dijabarkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Keuangan; dan
- c. Bagian Pemantauan dan Evaluasi.

Namun, pada tahun 2022 terjadi perubahan struktur organisasi yang dijabarkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Perubahan struktur organisasi ini membuat Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2022 terdiri dari:

- d. Bagian Perencanaan;
- e. Bagian Pemantauan dan Evaluasi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Biro Perencanaan dan keuangan ini terdiri dari para Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sementara itu, struktur organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan dapat pula digambarkan dalam bagan berikut ini:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan



C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari pelayanan administratif yang diberikan kepada unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet melalui upaya peningkatan kualitas penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet; peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Sekretariat Kabinet; dan, peningkatan kualitas manajemen keuangan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Selain itu, Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan salah satu motor penggerak implementasi SAKIP yang tercermin dari proses koordinasi penyusunan Rencana Strategis sebagai salah satu tugas pokok dari Biro Perencanaan dan Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020, dijelaskan bahwa Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan salah satu unit kerja di bawah Deputi Bidang Administrasi, yang memiliki tugas memberikan

PENDAHULUAN

dukungan kebijakan dan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, serta pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran di Sekretariat Kabinet dan unit kerja lain yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet.

Sebagai unit kerja yang melakukan pengoordinasian penyusunan program dan anggaran serta memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Biro Perencanaan dan Keuangan membutuhkan sumber daya manusia yang memadai dan kompeten. Tidak hanya itu, Biro Perencanaan dan Keuangan juga membutuhkan dukungan dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet guna mendukung terwujudnya pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang juga merupakan pencapaian kinerja organisasi.

Di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, penting bagi organisasi untuk memiliki kesadaran penuh dalam pengambilan keputusan. Guna membantu mencapai kondisi ini, dilakukan analisis SWOT, sebagaimana tercantum dalam Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan, untuk mengidentifikasi *uncertainties* (ketidakpastian) yang mungkin terjadi dan mengantisipasi risiko dari ancaman lingkungan eksternal dan kelemahan internal organisasi. Identifikasi tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian analisis, yaitu analisis lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan analisis lingkungan eksternal (peluang dan ancaman). Analisis SWOT di bawah ini merupakan cerminan dari kondisi Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kabinet yang dianalisis dengan pendekatan 3 (tiga) unsur, yaitu sumber daya (*input*), proses, dan hasil (*output*).

Gambar 1.2
Analisis SWOT Biro Perencanaan dan Keuangan



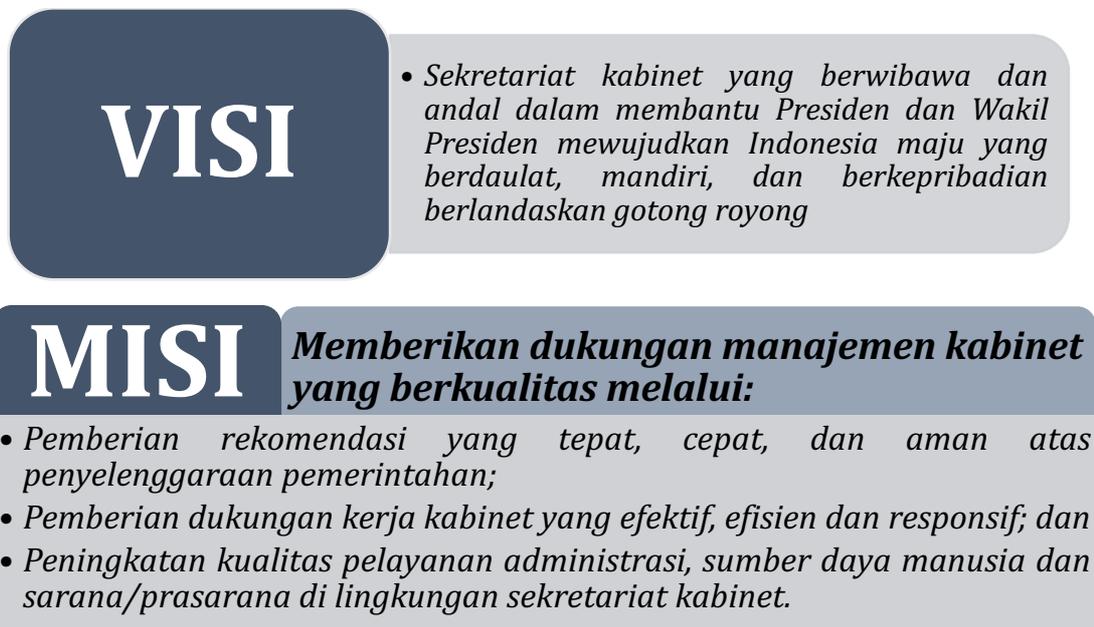
BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit kerja dibawah Deputi Bidang Administrasi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Guna mewujudkan terlaksananya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan menyusun Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dengan memperhatikan Rencana Strategis Institusi serta tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kabinet mendukung tercapainya Visi dan Misi Sekretariat Kabinet seperti yang tercantum pada Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020 – 2024, yaitu:

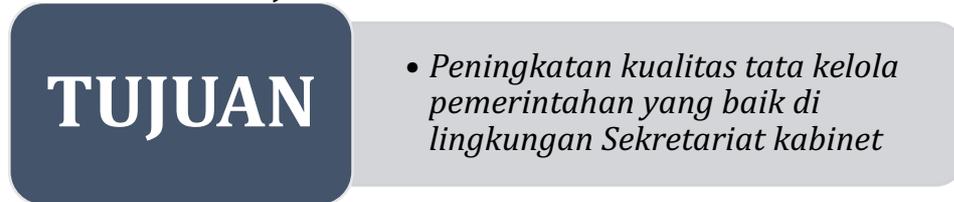
Gambar 2.1
Visi dan Misi Sekretariat Kabinet



Fokus Biro Perencanaan dan Keuangan dalam mendukung Misi Instansi pada “Peningkatan kualitas pelayanan administrasi, sumber daya manusia dan sarana/prasarana di lingkungan Sekretariat Kabinet”, yang selanjutnya akan menjadi acuan bagi segenap pejabat/pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan

dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsi yang sudah diamanatkan oleh organisasi. Dalam mewujudkan visi dan misi Sekretariat Kabinet, Biro Perencanaan dan Keuangan mendukung pencapaian tujuan Sekretariat Kabinet poin 4 yang tercantum pada Rencana Strategis Sekretariat Kabinet tahun 2020—2024, yaitu:

Gambar 2.2
Tujuan Sekretariat Kabinet Poin 4



Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan telah selaras dengan sasaran program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet, yaitu Terwujudnya kelancaran tugas, transparansi, dan akuntabilitas Sekretariat Kabinet, dengan indikator kinerja, yaitu Persentase kepuasan terhadap dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet serta Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet.

Dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian tujuan strategis, Biro Perencanaan dan Keuangan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Penetapan IKU dalam Perseskab Nomor 5 Tahun 2021. Berdasarkan Perseskab Nomor 5 Tahun 2021 dengan IKU baru adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

1. Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet
2. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
3. Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Pembayaran yang diselesaikan secara akurat
4. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran
5. Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan revisi anggaran

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja juga dilengkapi dengan jumlah alokasi anggaran yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan pencapaian kinerja. Hal ini menandai adanya anggaran berbasis kinerja dalam suatu organisasi, yaitu anggaran disusun berdasarkan target kinerja yang akan dicapai pada tahun berjalan. Sebagai salah satu unit kerja, Biro Perencanaan dan Keuangan menyusun Perjanjian Kinerja sebagai dasar penilaian atas keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target kinerja sebagai bagian dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan pada awal tahun dengan penetapan tanggal 31 Januari 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program dan Anggaran	Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	78%
2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Keuangan	1. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%
		2. Persentase penyelesaian penerbitan SPM yang diselesaikan secara akurat	96%
3.	Meningkatnya Kualitas Pemantauan dan Evaluasi	1. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	80%

PERENCANAAN KINERJA

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		2. Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan revisi anggaran	80%
4.	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan yang efektif	1. Indeks Revisi Program dan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	B (5-8 kali revisi)
		2. Persentase penyerapan anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	90%

Guna mewujudkan kinerja yang sudah diperjanjikan, Biro Perencanaan dan Keuangan didukung oleh pagu alokasi anggaran awal sebesar Rp1.500.000.000,00. Sepanjang tahun 2022 dilakukan realokasi anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan dari BA K/L ke BA BUN sebesar Rp110.719.000,00 atau sebesar 7,38% persen dari alokasi anggaran awal tahun. Sehingga, pagu anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan menjadi sebesar Rp1.389.281.000,00 atau sebesar 92,62 % dari pagu alokasi anggaran awal tahun.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan perwujudan atas pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja (LKj) adalah upaya untuk meneguhkan komitmen pemerintah dalam proses penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*) dan akuntabel. LKj Biro Perencanaan dan Keuangan disusun sebagai komitmen dan upaya Biro untuk selalu mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Sekretariat Kabinet sebagai organisasi pemerintah yang akuntabel.

Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki peran penting dalam susunan organisasi Sekretariat Kabinet. Peran tersebut dimanifestasikan melalui dukungan terhadap 1 (satu) program **“Dukungan Manajemen”** dan 1 (satu) kegiatan yaitu **“Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan”**. Pelayanan Biro mencakup seluruh manajemen/pengelolaan keuangan mulai dari proses perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet; pelayanan administrasi keuangan dalam rangka pelaksanaan program dan anggaran; sampai dengan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet.

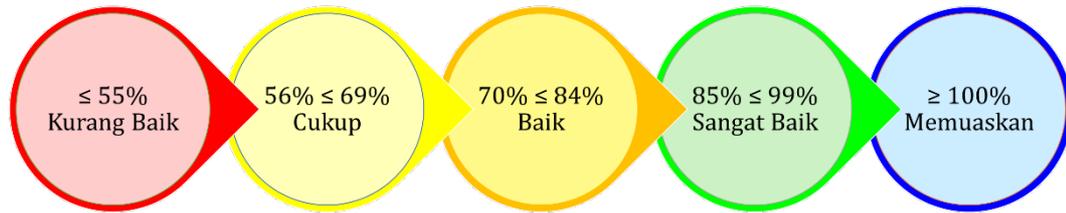
Di tahun 2022 kondisi pandemi berangsur pulih, kegiatan-kegiatan banyak kembali dilakukan secara *offline* dan mobilitas kembali lebih leluasa dilakukan. Kondisi ini mendukung Biro Perencanaan dan Keuangan untuk memaksimalkan kinerjanya dan mencapai target-target yang telah ditetapkan. Berikut adalah capaian kinerja yang diraih Biro Perencanaan dan Keuangan sepanjang tahun 2022.

A. Capaian Kinerja

Pengukuran atas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam PK Biro Perencanaan dan Keuangan dengan realisasinya. Capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022 dimonitor secara triwulanan dan dilaporkan kepada pimpinan melalui Laporan Capaian Rencana Aksi Penetapan Kinerja Triwulanan. Pada tahun 2022, Biro Perencanaan dan Keuangan masih menggunakan kategori capaian kinerja seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu:

AKUNTABILITAS KINERJA

Gambar 3.1
Kategori Pencapaian Kinerja



Pada tahun 2022 terdapat pergantian pejabat untuk Kepala Biro Perencanaan dan keuangan. Namun untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan PK 2021 tetap sama yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2022

TAHUN 2021		TAHUN 2022	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	77%	Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	78%
Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%
Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan secara akurat	95%	Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Pembayaran yang diselesaikan secara akurat	96%
Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	85%	Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	80%
Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan revisi anggaran	80%	Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan revisi anggaran	80%

Bentuk tanggungjawab Biro Perencanaan dan Keuangan atas apa yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, dilaporkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT2). Tangkapan Layar *dashboard* SIKT2 tahun 2022 sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar 3.2
Tangkapan Layar Dashboard SIKT2 2022

Perjanjian Kinerja Saya		Tahun 2022			
31 Januari 2022 - Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Djaka Warsijanto, S.Sos., M.Ak.					
SASARAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran	Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	Outcome: <input type="text"/>	Outcome: 109.14%	Outcome: <input type="text"/>	Outcome: <input type="text"/>
		Output: <input type="text"/>	Output: 109.14%	Output: <input type="text"/>	Output: <input type="text"/>
Meningkatnya kualitas manajemen keuangan	Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Outcome: <input type="text"/>	Outcome: 100%	Outcome: <input type="text"/>	Outcome: <input type="text"/>
	Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Pembayaran yang diselesaikan secara akurat	Output: <input type="text"/>	Output: 100%	Output: <input type="text"/>	Output: <input type="text"/>
Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi	Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	Outcome: <input type="text"/>	Outcome: 125%	Outcome: <input type="text"/>	Outcome: <input type="text"/>
	Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan revisi anggaran	Output: <input type="text"/>	Output: 108.28%	Output: <input type="text"/>	Output: <input type="text"/>
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	Outcome: <input type="text"/>	Outcome: <input type="text"/>	Outcome: <input type="text"/>	Outcome: <input type="text"/>
		Output: <input type="text"/>	Output: <input type="text"/>	Output: <input type="text"/>	Output: <input type="text"/>
	Persentase penyerapan anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	Outcome: 24.73%	Outcome: 46.50%	Outcome: 68.96%	Outcome: <input type="text"/>
		Output: 24.75%	Output: 46.50%	Output: 68.96%	Output: <input type="text"/>

Capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan untuk setiap indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam PK dapat diuraikan berdasarkan masing-masing sasaran kegiatan.

Sasaran
1

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program dan Anggaran

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Capaian kinerja pada sasaran 1 diukur melalui 1 (satu) indikator utama, yaitu:

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	78%

Uraian mengenai capaian tersebut dapat dilihat dari Tabel Indikator, Target, Realisasi dan Persentase Capaian berikut:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2022

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
<i>Output:</i>				
1. Renja berdasarkan Pagu Indikatif	Dok	1	1	100%
2. Renja Berdasarkan Pagu Anggaran	Dok	1	1	100%
3. RKA – KL Berdasarkan Pagu Anggaran	Dok	1	1	100%
4. RKA – KL Berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran	Dok	1	1	100%
<i>Outcome :</i> Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	%	78	85,16%	109,18%



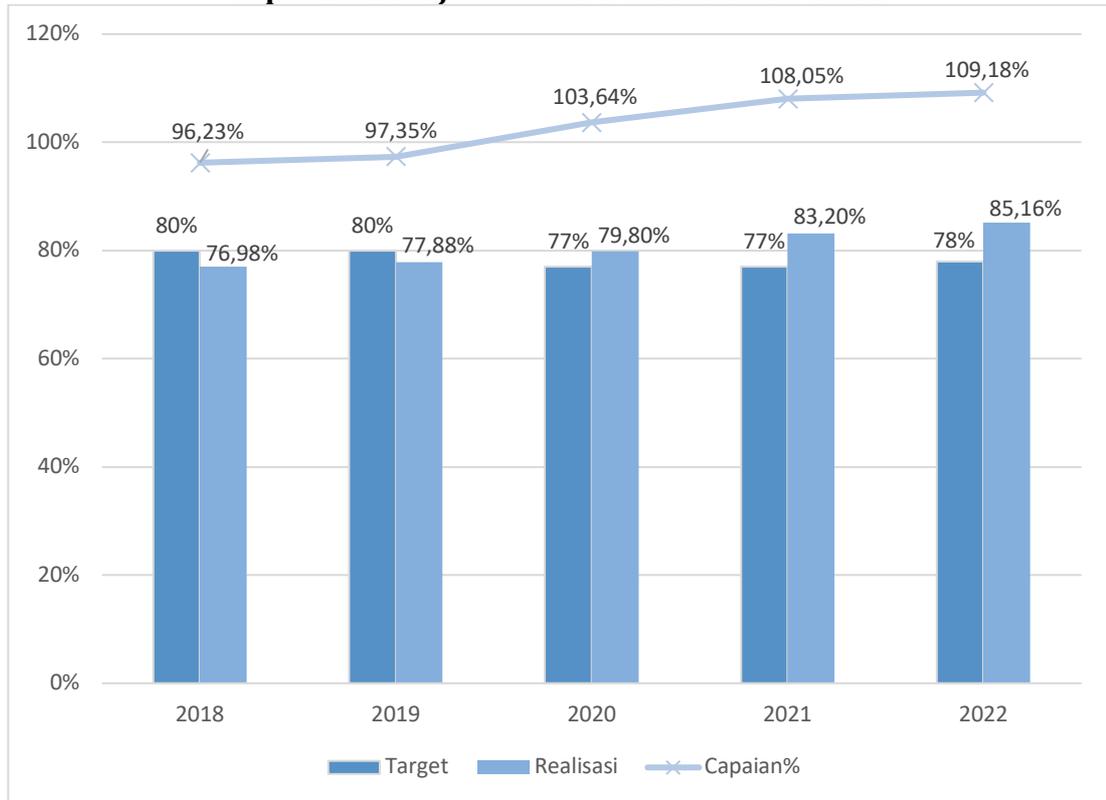
1 Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet

Untuk mengukur persentase atas capaian kinerja dari indikator kinerja di atas, digunakan rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Persentase pencapaian rencana} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Indikator kinerja sasaran 1 Biro Perencanaan dan Keuangan adalah “Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet”. Sejak tahun 2014, indikator kepuasan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet telah digunakan untuk mengukur kualitas layanan perencanaan program dan anggaran. Grafik berikut ini menggambarkan capaian dari indikator dimaksud sejak tahun 2018 hingga tahun 2022.

Grafik 3.1
Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2018-2022



Grafik di atas menggambarkan tren realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Sasaran 1 sepanjang tahun 2018 s.d 2022 dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum pada Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2015-2019 dan 2020-2024. Secara garis besar, sepanjang 5 (lima) tahun terakhir, capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 selalu mengalami peningkatan. Namun demikian, pada tahun 2018 dan 2019, Biro Perencanaan dan Keuangan belum dapat mencapai target yang ditentukan sebesar 80%. Berkaca pada kondisi ini, pada tahun 2020 dilakukan penyesuaian target yang menyebabkan target di tahun 2020 dan 2021 berubah menjadi 77%. Pada tahun 2020 dan 2021, target sebesar 77% tersebut dapat tercapai dengan realisasi sebesar 77,88% dan 79,80%. Target Indikator Kinerja Sasaran 1 ini kemudian kembali meningkat

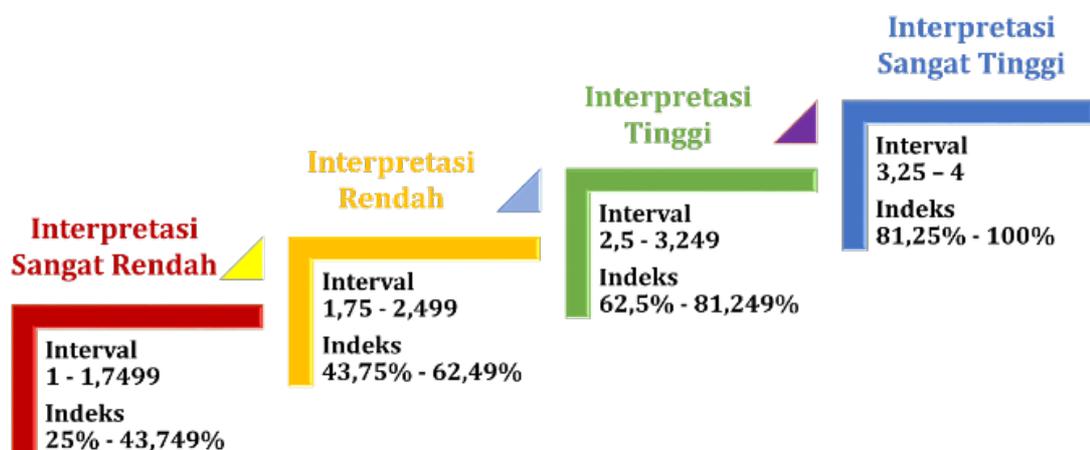
AKUNTABILITAS KINERJA

menjadi 78% pada tahun 2022 dengan realisasi yang juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 85,16%.

Sementara itu, interpretasi indeks atas hasil pengukuran tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet menggunakan kriteria penilaian berikut ini:

Gambar 3.3

Kriteria Penilaian Capaian Kinerja



Untuk menghitung tingkat kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet tahun 2022, dilaksanakan survei 2 (dua) survei *online* pada semester I dan semester II. Survei semester I dilakukan kepada 45 (empat puluh lima) responden pada tanggal 16 s.d 24 Juni 2022. Sementara itu, survei semester II dilakukan pada 30 November s.d 9 Desember 2022 kepada 45 (empat puluh lima) responden.

Kedua survei ini menggunakan 5 (lima) kategori/dimensi kualitas yaitu: keandalan dalam pelayanan (*reliability*), kompetensi (*competence*), komunikasi (*communication*), akses (*access*), dan kepatuhan pada *deadline* (*deadline compliance*). Kelima aspek ini berbeda dari aspek-aspek di tahun sebelumnya (hingga 2021). Perubahan ini dilakukan guna membuat kategori/dimensi penilaian semakin relevan, objektif, dan mencerminkan layanan yang diberikan. Hasil survei pada semester I dan II dapat dilihat pada table berikut ini.

AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 3.4
Hasil Penilaian Responden pada Sasaran 1 Tahun 2022

A. Keandalan Dalam Pelayanan (<i>Reliability</i>)		Smt I	Smt II
1	Kemampuan pegawai memberikan informasi terkini terkait penyusunan program dan anggaran.	85,56%	86,11%
2	Kemampuan pegawai memberikan informasi terkait penyusunan program dan anggaran dengan akurat.	86,67%	84,44%
Nilai Kumulatif		86,11%	85,28%
B. Kompetensi Dalam Pelayanan (<i>Competence</i>)		Smt I	Smt II
3	Pengetahuan pegawai yang cukup terkait penyusunan program dan anggaran.	88,33%	87,78%
4	Keakuratan hasil penyusunan perencanaan program dan anggaran.	82,78%	83,33%
5	Kemampuan pegawai dalam hal penggunaan sarana dan prasarana (aplikasi KRISNA, SAKTI, online meeting) yang mendukung kecepatan penyelesaian perencanaan program dan anggaran.	83,33%	85,00%
Nilai Kumulatif		84,81%	85,37%
C. Komunikasi Dalam Pelayanan (<i>Communication</i>)		Smt I	Smt II
6	Akses komunikasi dan koordinasi pegawai melalui berbagai macam media (telepon, WA, email, tatap muka).	91,67%	89,44%
7	Kemampuan komunikasi dan koordinasi pegawai yang baik terkait penyusunan perencanaan program dan anggaran.	88,33%	87,78%
8	Kemampuan pegawai memberi <i>feedback</i> atas permasalahan dan kesulitan terkait penyusunan perencanaan program dan anggaran yang dihadapi unit kerja.	86,67%	86,67%
9	Keterbukaan pegawai untuk konsultasi permasalahan terkait penyusunan perencanaan program dan anggaran yang dihadapi unit kerja.	85,56%	87,78%
Nilai Kumulatif		88,06%	87,92%
D. Kemudahan Akses Dalam Pelayanan (<i>Access</i>)		Smt I	Smt II
10	Akses pembaruan regulasi (<i>updated regulation</i>) terkait penyusunan perencanaan program dan anggaran yang diberikan pegawai kepada unit kerja.	84,44%	82,78%

AKUNTABILITAS KINERJA

11	Kertas kerja yang disiapkan dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran mudah untuk dimengerti.	83,33%	83,33%
12	Ketersediaan media/fasilitas (contoh: format Proker/RAB/KAK, ruang rapat/ruang <i>virtual meeting</i> , dll) dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran.	85,56%	84,44%
Nilai Kumulatif		84,44%	83,52%
E. Kepatuhan Terhadap Deadline (<i>Deadline Compliance</i>)		Smt I	Smt II
13	Kepatuhan pegawai terhadap <i>deadline</i> penyusunan perencanaan program dan anggaran dari mitra kerja di Bappenas, Kemenkeu, KemenpanRB, dan Kominfo.	82,22%	83,89%
Nilai Kumulatif		82,22%	83,89%

Berdasarkan tabulasi penilaian responden terhadap layanan penyusunan program dan anggaran di atas, melalui perhitungan rata-rata semester I dan II didapatkan nilai sebesar 85,16% atau berada pada **“Sangat Tinggi” (81,25 – 100%)**. Adapun target survei pada Rencana Kerja tahun 2022 adalah sebesar 78% sehingga capaian survei pada rata-rata kedua survei tersebut adalah sebesar **109,18%**.

Jika dibandingkan dengan perolehan nilai pada tahun 2021 sebesar 83,20%, perolehan nilai pada tahun 2022 mengalami **kenaikan** sebesar **1.96%**. Pencapaian pada tahun 2022 ini memang tidak dapat dibandingkan secara detil (per aspek) dengan pencapaian tahun 2021 dikarenakan adanya perubahan dimensi/indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan. Meskipun demikian, hasil analisis survei keduanya dapat memberikan gambaran mengenai aspek-aspek yang menjadi *highlight* dari evaluasi kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan utamanya terkait kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran.

Beberapa hal yang menjadi catatan dan refleksi berdasarkan hasil survei tahun 2022 antara lain ialah sebagai berikut.

1. Koordinasi antara Biro Perencanaan dan Keuangan serta dengan unit kerja di Sekretariat Kabinet, perlu terus dijaga dan ditingkatkan sehingga proses perencanaan program dan anggaran di Sekretariat Kabinet dapat berjalan dengan lancar.
2. Penyampaian informasi terkait perencanaan program dan anggaran kepada unit kerja seperti jadwal kegiatan (*time table*), Standar Operasional Prosedur

AKUNTABILITAS KINERJA

(SOP), peraturan, dan kebijakan/regulasi perlu untuk dilakukan secara berkala sehingga terwujud pemahaman yang baik pada unit kerja terkait proses penyusunan dokumen program dan anggaran.

3. Permintaan data perlu dilakukan dengan tenggat waktu yang lebih longgar mengingat banyaknya koordinasi internal yang harus dilakukan unit kerja. Kerap kali tenggat waktu dirasa terlalu singkat sehingga menyulitkan unit kerja dalam menyusun data yang tepat.
4. Pengetahuan dan ilmu pegawai terkait program dan anggaran perlu terus dimutakhirkan agar dapat memberikan pendampingan yang optimal kepada unit kerja terkait penyusunan perencanaan program dan anggaran.
5. Koordinasi dengan mitra dan unit kerja dalam bentuk Trilateral Meeting perlu dilakukan dengan lebih rapi dan efisien agar pembahasan berjalan dengan fokus dan efektif.
6. Koordinasi dan kolaborasi antara Biro Perencanaan dan Keuangan dengan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi perlu dijalin dengan baik agar keselarasan dokumen perencanaan kinerja dapat terwujud.

Selain catatan diatas, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet, yaitu:

1. Belum adanya Sistem Aplikasi yang dapat mendeteksi adanya permasalahan dan memantau sejauh mana proses penyusunan program kerja, RAB, dan KAK.
2. Unit kerja masih belum sepenuhnya memahami siklus, proses dan teknis penyusunan perencanaan program dan anggaran.
3. Penyampaian program kerja, RAB, dan KAK oleh unit kerja tidak tepat waktu.
4. Kekurangtelitian dalam penyusunan RAB, antara lain ketidakselarasan antara dokumen KAK dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan data dukung lainnya, RAB belum sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM), kesalahan perhitungan pada harga satuan maupun total, kurs dollar yang belum disesuaikan dengan data terkini, dan penggunaan akun belum sesuai dengan peruntukannya.
5. Masih terdapat kendala pada penggunaan aplikasi SAKTI.
6. Aplikasi KRISNA belum terintegrasi secara sempurna dengan aplikasi SAKTI.
7. Regulasi terkait perencanaan mengalami perubahan yang dinamis secara terus menerus.

Sementara itu, berikut ini adalah kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang, sebagai upaya-upaya perbaikan terkait dengan hasil survei yaitu:

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Mengikuti kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait perencanaan program dan anggaran serta meningkatkan koordinasi dengan mitra Kemenkeu dan Bappenas.
2. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan kepada unit kerja melalui para koordinator dan pelaksana teknis.
3. Melakukan penyebarluasan informasi kepada unit kerja melalui Surat Edaran dan Memorandum serta penguatan diseminasi melalui koordinasi yang dilakukan dalam bentuk komunikasi informal.
4. Menyusun petunjuk teknis proses dan siklus penyusunan program dan anggaran.

Berikut uraian tentang akuntabilitas keuangan sasaran **“Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program dan Anggaran”** dilihat dari aspek persentase serapan, penghematan dana maupun efisiensi dan efektifitas penggunaan anggarannya.

Tabel 3.5

Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran Sasaran 1 Tahun 2022

No	% Realisasi Outcome	Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
1.	85,16%	Jumlah dokumen perencanaan program: 1. Renja berdasarkan Pagu Indikatif 2. Renja berdasarkan Pagu Anggaran 3. RKA – KL berdasarkan Pagu Anggaran 4. RKA – KL berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran	Output	Dok	4	4
			Input	Rupiah	356.003.000	349.306.655
			Input rata-rata per output	Rupiah	89.000.750	87.326.664
1. Penghematan dana = Rp6.696.345 (0,02%)						
2. Efisiensi = Rp1.674.086 (0,02%)						
3. Efektivitas = % capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)						

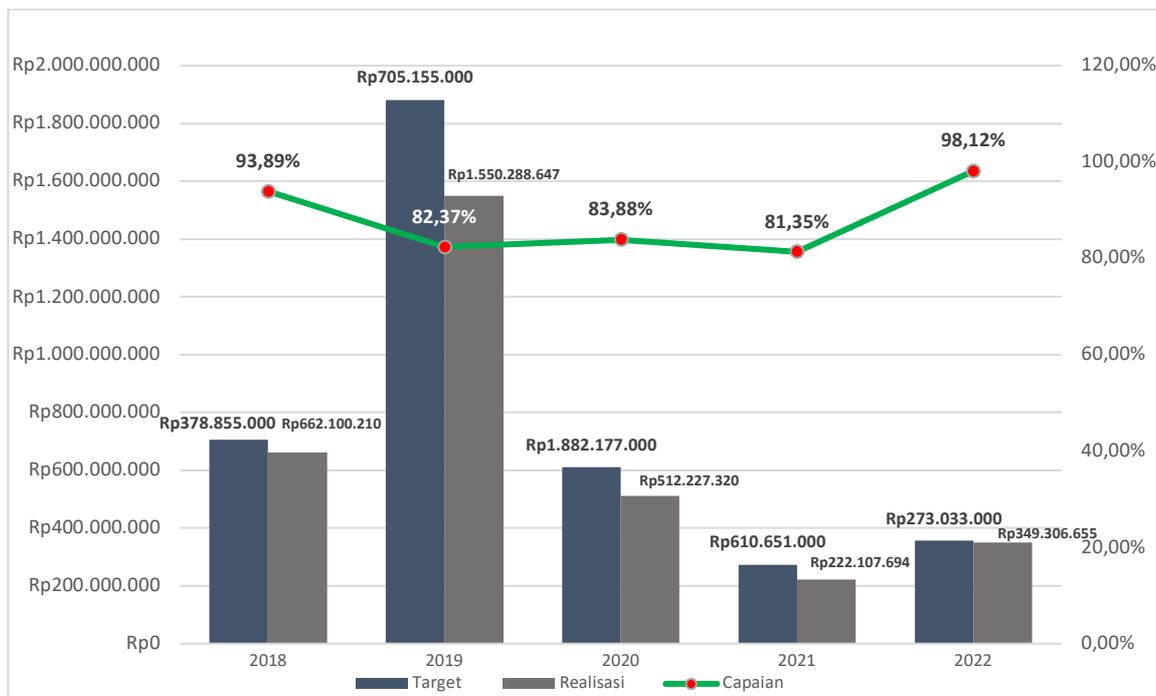
AKUNTABILITAS KINERJA

Pencapaian sasaran 1 diwujudkan melalui kegiatan Pengoordinasian penyusunan, penelaahan, dan pembahasan dokumen perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet, dan output yang digunakan untuk mengukur efisiensi anggaran dari sasaran ini adalah:

1. Rencana Kerja berdasarkan Pagu Indikatif;
2. Rencana Kerja berdasarkan Pagu Anggaran;
3. RKA-KL berdasarkan Pagu Anggaran; dan
4. RKA-KL berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran.

Proses kegiatan tersebut didukung anggaran sebesar Rp356.003.000,00 (pagu revisi) (input) dan terealisasi sebesar Rp349.306.655,00 atau 98,12% dari rencana pagu anggaran yang telah tersedia. Realisasi anggaran sebesar 98,12% ini diiringi dengan tercapainya seluruh output yang ditargetkan dapat tercapai. Realisasi anggaran tahun 2022 ini meningkat sebesar 16,77% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021. Kenaikan realisasi anggaran ini didukung dengan situasi pandemi Covid-19 yang berangsur pulih sehingga membuat koordinasi yang bersifat tatap muka dapat kembali dilakukan. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Sasaran 1 sepanjang 5 tahun terakhir (2018 sampai dengan 2022) dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.2
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran pada Sasaran 1
Tahun 2018-2022



Secara umum, capaian kinerja untuk indikator kinerja “**Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran**”

Sekretariat Kabinet” adalah sebesar 109,18% (Memuaskan), dihitung dari rata-rata realisasi dari tingkat kepuasan unit kerja di semester I dan II sebesar 85,16% dibagi dengan target 78%.

Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Manajemen Keuangan

2.1. Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Salah satu fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan adalah penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan. Fungsi tersebut adalah melaksanakan pelayanan dukungan teknis dan administrasi keuangan, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan, dan pengoordinasian penyelesaian kerugian negara di lingkungan Sekretariat Kabinet dan unit kerja lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet. Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis yang telah dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Sasaran strategis kedua Biro Perencanaan dan Keuangan adalah **“Meningkatnya Kualitas Manajemen Keuangan”**. Guna menilai pencapaian sasaran strategis tersebut, ditetapkan beberapa indikator kinerja sebagai acuan pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Indikator kinerja tersebut adalah:

1. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan secara akurat.

Adapun capaian indikator kinerja selama tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran 2.1 Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada tahun 2022, kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan ditargetkan sebesar 100%, dan secara keseluruhan target tersebut terealisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2021 Nomor: 48A/LHP/XVI/05/2022 dan 48B/LHP/XVI/05/2022 tanggal 23 Mei 2022, BPK memberikan opini bahwa

Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Setkab tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Selanjutnya, perbandingan target dan capaian kinerja sasaran terkait kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan selama lima tahun terakhir (Tahun 2018-2022) dirinci pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran 2.1 Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun				
	2022	2021	2020	2019	2018
Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah					
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, persentase capaian kinerja terkait kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan kinerja selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena sistem dan koordinasi penyusunan laporan keuangan yang ada baik internal dan eksternal sudah baik.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan bertanggungjawab untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan. Selain kesesuaian dengan SAP,

AKUNTABILITAS KINERJA

ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan kepada Kementerian Keuangan juga menjadi tolak ukur dalam mendukung pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan. Adapun selama tahun 2022, ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Penyampaian Laporan Keuangan

No.	Laporan Keuangan	Dasar Penetapan Waktu Penyampaian	Target Waktu	Realisasi Penyampaian	Status
1	Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet (<i>Unaudited</i>) Tahun 2021	Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor:S-27/PB/PB.6/2021, tanggal 31 Desember 2021	18 Februari 2022	15 Februari 2022	Tepat Waktu
2	Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet (<i>Audited</i>) Tahun 2021	Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor:S-17/PB/PB.6/2022, tanggal 2 April 2022	10 Mei 2022	26 April 2022	Tepat Waktu
3	Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2022	Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor:S-75/PB.6/2022, tanggal 29 Juli 2022	31 Juli 2022	27 Juli 2022	Tepat Waktu
4	Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Triwulan III	Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor:S-40/PB/PB.6/2022, tanggal 30 September 2022	31 Oktober 2022	24 Oktober 2022	Tepat Waktu

Laporan Keuangan TA 2022 telah disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Standar tersebut menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Sekretariat Kabinet, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan dan belanja dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sekretariat Kabinet sebagai salah satu Satuan Kerja pada pemerintah pusat merupakan entitas akuntansi yang menjadi bagian dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang memiliki peranan penting dalam menyediakan data dan informasi

yang lengkap dan benar demi tercapainya Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang berkualitas.

Dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Keuangan, dilakukan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara Sekretariat Kabinet selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I selaku Bendahara Umum Negara (BUN) secara periodik yaitu setiap sebulan sekali. Dalam rekonsiliasi tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca yang disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), sedangkan Kuasa BUN menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Selain itu telah dilaksanakan pula rekonsiliasi internal untuk membandingkan realisasi anggaran berdasarkan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) dengan Sistem Informasi Keuangan (SISKA).

2.2. Persentase Penyelesaian Penerbitan Surat Perintah Membayar yang Diselesaikan Secara Akurat

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran 2.2 Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan secara akurat	96%	97%	102%

Indikator kinerja kedua yaitu “Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan secara akurat” merupakan salah satu indikator yang ada pada 8 indikator IKPA, dimana nilai IKPA suatu instansi mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanjanya terhadap kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan kegiatan, efisiensi pelaksanaan kegiatan, dan kepatuhan terhadap peraturan.

Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. SPM diproses menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (DSITP), Ditjen Perbendaharaan (DJPb). SPM berlaku sebagai surat perintah kepada KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah untuk mencairkan dana APBN. SPM beserta dokumen pendukung yang dilengkapi dengan Arsip Data Komputer (ADK),

AKUNTABILITAS KINERJA

disampaikan kepada KPPN oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk paling lambat dua hari kerja setelah SPM diterbitkan.

Adapun untuk mengukur persentase atas capaian kinerja dari indikator kinerja ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah SPM yang diterbitkan tanpa pengembalian dari KPPN}}{\text{Jumlah Total SPM yang terbit}} \times 100\%$$

Selanjutnya, perbandingan target dan capaian kinerja sasaran terkait jumlah persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan secara akurat pada tahun 2021 - 2022 dirinci pada tabel berikut.

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Sasaran 2.2 Tahun 2021 - 2022

Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Manajemen Keuangan					
Indikator Kinerja: Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan secara akurat					
TAHUN 2021			TAHUN 2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
95%	88.61%	93.27%	96%	97%	102%

Realisasi indikator kinerja “Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan secara akurat” pada akhir tahun sebesar 97% yang diperoleh dengan membandingkan jumlah SPM Akurat sebanyak 1.631 SPM dan jumlah SPM yang dikirim KPPN sebanyak 1.673 SPM. Jika membandingkan dengan targetnya, maka persentase capaian kinerja atas indikator kinerja dimaksud adalah sebesar **102%**.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan hasil capaian dari tahun 2021 ke tahun 2022. Selain didorong oleh tekad Biro Perencanaan dan Keuangan untuk memberikan kinerja terbaiknya dengan melakukan verifikasi pada setiap SPM yang akan terbit, peningkatan sebagaimana dimaksud mengindikasikan pemahaman teknis penyelesaian SPM oleh para pengelola keuangan yang semakin baik, pengimplementasian Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Full Modul yang dimulai tahun 2022 juga mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih efisien dan efektif.

AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 3.11

Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran Sasaran 2 Tahun 2022

No	% Realisasi Outcome	Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
1.	98,5%	Jumlah dokumen manajemen keuangan: 1. Laporan Keuangan Tahunan Audited 2. Laporan Keuangan Tahunan Un-Audited 3. Laporan Keuangan Semesteran 4. Laporan Perbendaharaan	Output	Dok	4	4
			Input	Rupiah	545.170.000	545.093.378
			Input rata-rata per output	Rupiah	136.292.500	136.273.345
1. Penghematan dana = Rp76.622 (0,0001%)						
2. Efisiensi = Rp19.155(0,0001%)						
3. Efektivitas = % capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)						

Berdasarkan tabel Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran Sasaran 2 Tahun 2022 di atas, proses kegiatan pada sasaran 2 didukung anggaran sebesar Rp545.170.000,00 (pagu revisi) (input) dan terealisasi sebesar Rp545.093.378,00 atau sebesar 99,99% dari rencana pagu anggaran yang telah tersedia.

Pencapaian kinerja dari kedua indikator yaitu kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Penyelesaian Penerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan Secara Akurat sudah dicapai dengan sangat baik, dengan tetap kedepannya akan ditingkatkan kembali guna mencapai pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan secara lebih optimal.

Sasaran 3

Meningkatnya Kualitas Pemantauan dan Evaluasi

Capaian kinerja pada sasaran 3 diukur melalui 2 (dua) indikator utama pada tahun 2022, yaitu:

Indikator Utama 1 Indikator 3.1 dengan Target 80%

- Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran

Indikator Utama 2 Indikator 3.2 dengan Target 80%

- Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan revisi anggaran

Sama dengan tahun-tahun sebelumnya, pengukuran capaian kedua indikator utama dimaksud diukur melalui survei. Survei untuk mengukur capaian kinerja unit-unit kerja di Kedeputan Bidang Administrasi dilaksanakan pada semester I dan semester II kepada Pejabat/Pegawai di lingkungan Sekretariat kabinet. Survei semester I dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni s.d 20 Juni 2022 secara daring (*online*) dengan 50 responden untuk Survei terkait Tingkat Kepuasan Layanan Revisi Anggaran dan 108 responden untuk Survei terkait Tingkat Pemanfaatan Laporan/ Dokumen, sedangkan survei semester II dilaksanakan mulai tanggal 5 Desember s.d 9 Desember 2022 secara daring (*online*) dengan 35 responden untuk Survei terkait Tingkat Kepuasan Layanan Revisi Anggaran dan 56 responden untuk Survei terkait Tingkat Pemanfaatan Laporan/ Dokumen.

Survei terkait pemanfaatan dokumen terbagi menjadi 3 (tiga) kategori penilaian, yaitu:

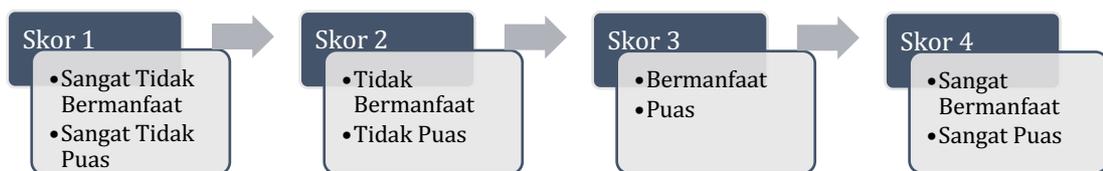
- a. Kebermanfaatan Laporan/Dokumen dalam penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran ditahun mendatang;
- b. Kebermanfaatan Laporan/Dokumen dalam monitoring pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran pada tahun berjalan; dan
- c. Kebermanfaatan Laporan/Dokumen untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.

Sedangkan survei kepuasan layanan revisi anggaran terbagi ke dalam 5 (lima) kategori, yaitu: Ketanggapan dalam pelayanan (*Responsiveness*); Keandalan dalam pelayanan (*Reliability*); Sarana dan prasarana fisik (*Tangible*); Kepastian dalam pelayanan (*Assurance*); dan Sikap dalam pelayanan (*Empaty*).

AKUNTABILITAS KINERJA

Terkait survei kepuasan layanan revisi anggaran di semester 2, pada kategori/dimensi Responsiveness terdapat penyederhanaan, yang sebelumnya ada 3 pertanyaan menjadi 2 pertanyaan, yaitu pertanyaan Ketanggapan petugas dalam memberikan layanan revisi anggaran menjadi Ketanggapan pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan dalam menyelesaikan usulan revisi anggaran dan pertanyaan Kesigapan dan kecepatan petugas dalam menanggapi pertanyaan/konsultasi terkait layanan revisi anggaran dan Kemudahan prosedur atau alur untuk mendapatkan layanan revisi anggaran menjadi Respon pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan dalam menanggapi pertanyaan/konsultasi terkait layanan revisi anggaran.

Kuesioner dalam survei pemanfaatan dokumen dan kepuasan pelayanan revisi anggaran dimaksud menggunakan 4 (empat) pilihan skala, dengan skor masing-masing jawaban sebagai berikut:



Adapun hasil capaian kinerja sasaran 3 pada kedua indikator sesuai penghitungan berdasarkan hasil survei dirinci pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi			Capaian
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
1. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	80%	81,75%	84,58%	83,16%	103,96%
2. Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan revisi anggaran	80%	86,62%	90,0%	88,35%	110,43%

Apabila dirinci secara lebih lanjut, capaian atas sasaran 3 dimaksud merupakan capaian atas outcome dan output sebagai berikut:

AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 3.13
Capaian Output dan Outcome Sasaran 3 Tahun 2022

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
<u>Output:</u>				
1. Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2021	Dok	1	1	100%
2. Laporan eMonev Bappenas Tahun 2021	Dok	1	1	100%
3. Laporan SMART Tahun 2021	Dok	1	1	100%
4. Laporan SMART Semester I Tahun 2022	Dok	1	1	100%
5. Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Anggaran Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2022	Dok	1	1	100%
<u>Outcome:</u>				
1. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	%	80	83,16%	103,96%
2. Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan revisi anggaran	%	80	88,35%	110,43%

3.1. Persentase Tingkat Pemanfaatan Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran

Indikator kinerja pertama dari sasaran 3 berupa “Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran” dengan target sebesar 80%. Adapun target, realisasi dan capaian sasaran ketiga indikator pertama (sasaran 3.1.) dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3.1



Berdasarkan gambar 3.4 dapat diperoleh informasi bahwa realisasi indikator kinerja sasaran 3.1 sebesar 83,17%, jika dibandingkan dengan target sebesar 80%, diperoleh persentase capaian sebesar 103,96%. Adapun rincian capaian sasaran 3.1 berdasarkan hasil survei 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Sasaran 3.1 Tahun 2022

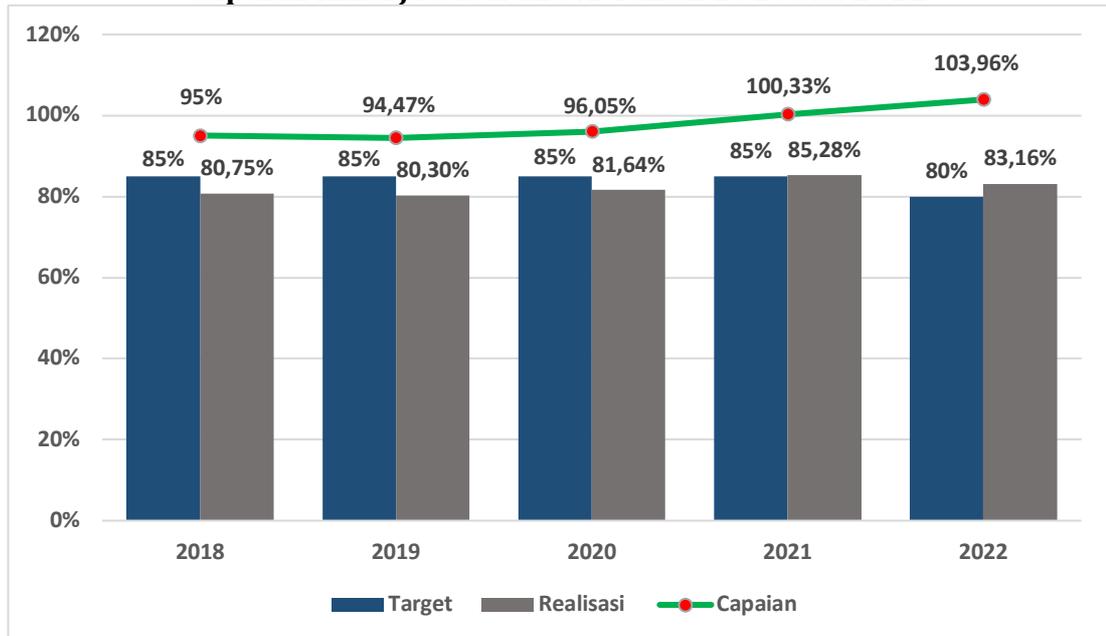
Kategori Pemanfaatan	2021	2022		
		Smt.1	Smt.2	Rata-rata
Kebermanfaatan Laporan/Dokumen dalam penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran ditahun mendatang	84,63%	82,06%	84,21%	83,14%
Kebermanfaatan Laporan/Dokumen dalam monitoring pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran pada tahun berjalan	85,22%	82,06%	85,31%	83,68%
Kebermanfaatan Laporan/Dokumen untuk perbaikan/peningkatan kinerja dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran	86,00%	81,13%	84,21%	82,67%
Rata-rata	85,28%	81,75%	84,58%	83,16%

Berdasarkan hasil survey 2022, kebermanfaatan Laporan/Dokumen dalam monitoring pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran pada tahun berjalan memperoleh indeks tertinggi yaitu sebesar **83,68%**. Sedangkan secara rata-rata indeks pemanfaatan dokumen memperoleh nilai **83,16%** masuk kedalam kriteria interpretasi "**sangat tinggi**". Hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran tahun 2022 sangat bermanfaat sebagai bahan evaluasi oleh pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet.

AKUNTABILITAS KINERJA

Indikator kinerja terkait tingkat pemanfaatan dokumen hasil evaluasi sudah digunakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai indikator kinerja kegiatan sejak tahun 2009 s.d. 2022. Namun tentu disesuaikan dengan dinamika organisasi yang mengalami perubahan struktur, tata kerja serta sumber daya manusia. Berikut akan dijabarkan target dan capaian indikator kinerja sasaran 3.1. sejak tahun 2018 s.d. 2022.

Grafik 3.3
Capaian Kinerja Sasaran 3.1 Tahun 2018 s.d. 2022



Apabila dilihat pada grafik di atas, persentase capaian sasaran 3.1 mengalami tren kenaikan sejak tahun 2019 hingga 2021 namun mengalami penurunan nilai survei pemanfaatan dokumen di tahun 2022 sebesar 2,12%. Terkait capaian persentase kinerja sasaran 3.1. beberapa hal berikut perlu dipertimbangkan sebagai faktor pendukung peningkatan, antara lain:

- Meningkatkan kualitas laporan yang lebih komprehensif. Menerbitkan laporan pada setiap semester dan triwulan sebagai bahan masukan bagi unit kerja untuk meningkatkan kinerja anggarannya ditahun berjalan.
- Meningkatkan ketepatan waktu penerbitan laporan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja anggaran.
- Memperbaiki dokumen laporan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja anggaran agar menarik, mudah dipahami, dan lebih ringkas dengan menggunakan media infografis.
- Renkeu juga selalu menjalin komunikasi yang intensif dengan unit kerja terkait pengumpulan data kinerja anggaran setiap bulannya.

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan jawaban responden atas kuesioner pada kolom saran pada survei 2022, diinventarisasi beberapa saran yang membangun dari unit kerja guna perbaikan kinerja sasaran 3.1., antara lain:

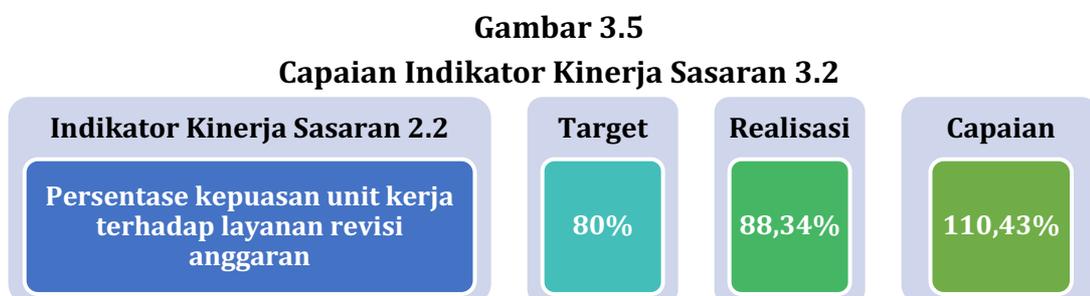
- Meningkatkan kualitas Laporan/Dokumen dengan membuat lebih sederhana, informatif dan mudah dipahami.
- Laporan/Dokumen dapat disajikan dalam bentuk infografis atau e-book agar lebih menarik.
- Meningkatkan diseminasi Laporan/Dokumen dan penerbitan laporan dilaksanakan tepat waktu agar unit kerja dapat melakukan evaluasi.
- Menyelenggarakan sosialisasi atas hasil evaluasi yang diterbitkan setiap triwulan kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Terkait saran tersebut, ditahun mendatang Biro Perencanaan dan Keuangan perlu melakukan beberapa hal antara lain:

- Perlu meningkatkan kualitas Laporan/Dokumen dan membuat lebih sederhana, informatif dan mudah dipahami. Laporan/Dokumen dapat disajikan dalam bentuk infografis atau e-book agar lebih menarik.
- Penerbitan laporan agar dapat dilaksanakan lebih cepat agar unit kerja dapat melakukan evaluasi. Laporan yang diterbitkan perlu lebih disosialisasikan lagi dengan unit Fasilitasi Operasional (FO).

3.2. Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan revisi anggaran

Indikator kinerja kedua dari sasaran 2 yaitu “Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan revisi anggaran” dengan target 80%. Adapun target, realisasi dan capaian sasaran ketiga indikator kedua (3.2) dapat dilihat pada gambar berikut:



Apabila dirinci capaian sasaran 3.2. berdasarkan hasil survei Semester 1 dan Semester 2 tahun 2021 adalah sebagai berikut:

AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Sasaran 3.2 Tahun 2022

Pernyataan	Hasil Survei smt. 1	Hasil Survei smt. 2	Rata-rata
Ketanggapan dalam pelayanan (<i>Responsiveness</i>)	87,50%	91,79%	89,64%
a. Ketanggapan petugas dalam memberikan layanan revisi anggaran	89,00%	92,86%	
b. Respon pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan dalam menanggapi pertanyaan/konsultasi terkait layanan revisi anggaran.	86,75%	90,71%	
Keandalan dalam pelayanan (<i>Reliability</i>)	86,33%	89,29%	87,81%
a. Kemampuan petugas dalam memberikan layanan revisi anggaran	87,50%	90,71%	
b. Ketepatan petugas dalam memberikan layanan revisi anggaran	85,50%	87,86%	
c. Kecepatan petugas dalam memberikan layanan revisi anggaran. Catatan : sesuai standar layanan, usulan revisi anggaran mulai diproses oleh petugas setelah data dukung lengkap dan benar	86,00%	89,29%	
Kepastian dalam Pelayanan (<i>Assurance</i>)	86,50%	90,00%	88,25%
a. Kepastian dalam memberikan layanan revisi anggaran	80,77%	90,00%	
b. Tanggungjawab petugas dalam memberikan layanan revisi anggaran	80,13%	90,00%	
Sikap dalam Pelayanan (<i>Empathy</i>)	87,50%	91,07%	89,29%
a. Keramahan petugas dalam memberikan layanan revisi anggaran	85,50%	91,43%	
b. Empati petugas dalam memberikan layanan revisi anggaran	87,50%	90,71%	
Sarana dan Prasarana dalam Pelayanan (<i>Tangible</i>)	85,25%	88,21%	86,73%
a. Ketersediaan media layanan revisi anggaran contoh: media konsultasi via online (wa/telepon/zoom/rapat)	87,00%	87,86%	
b. Ketersediaan format revisi anggaran yang mempermudah proses revisi anggaran	83,50%	88,57%	
Rata-rata	86,62%	90,07%	88,34%

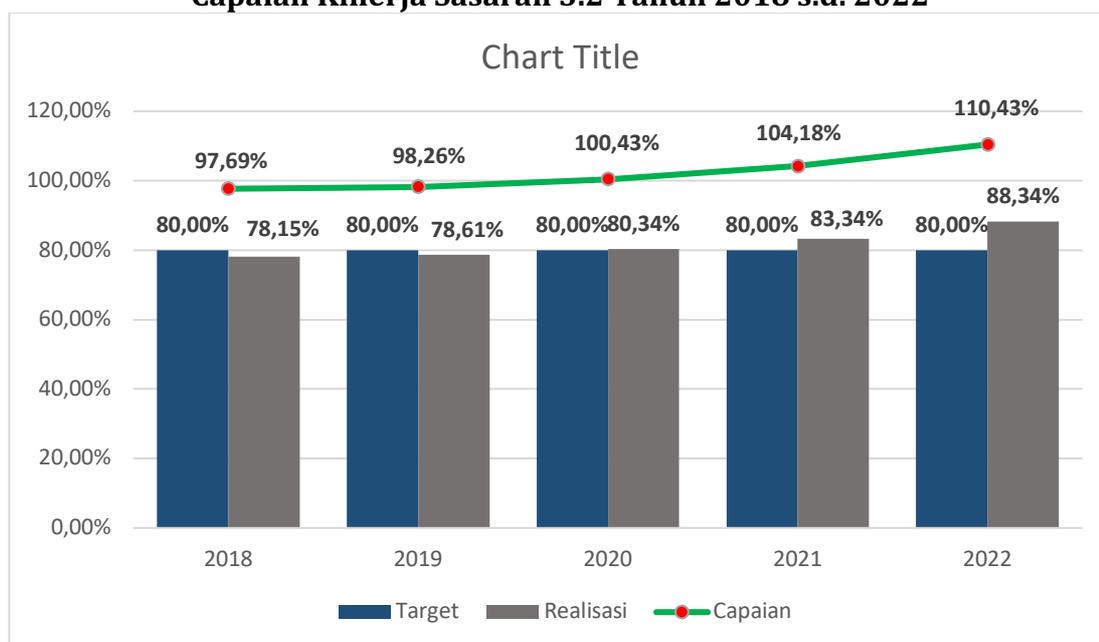
Berdasarkan hasil survey 2022, kategori ketanggapan dalam pelayanan (*responsiveness*) memperoleh indeks tertinggi yaitu sebesar 89,64%. Kategori sarana dan prasarana dalam pelayanan (*tangible*) memperoleh indeks terendah yaitu sebesar 86,73%, namun jika dibandingkan dengan nilai indeks tersebut tahun 2021, sarana dan prasarana dalam pelayanan (*tangible*) mengalami kenaikan sebesar sebesar 5,52%, hal ini disebabkan karena penggunaan media

AKUNTABILITAS KINERJA

konsultasi yang digunakan sangat beragam mulai dari wa dan telepon serta media komunikasi lain seperti virtual meeting dan rapat tatap muka sudah difasilitasi dan dimanfaatkan secara optimal untuk mempermudah komunikasi dengan unit kerja. Secara rata-rata indeks kepuasan pelayanan penyusunan revisi anggaran memperoleh nilai **88,34%** masuk kedalam kriteria interpretasi "**sangat tinggi**". Hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pelayanan yang diberikan dalam penyusunan dan penyelesaian revisi anggaran tahun 2022 memuaskan bagi pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Indikator kinerja terkait kepuasan layanan revisi anggaran sudah digunakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai indikator kinerja kegiatan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Berikut akan dijabarkan perbandingan target dan capaian indikator kinerja sasaran 3.2. sejak tahun 2018 s.d. 2022.

Grafik 3.4
Capaian Kinerja Sasaran 3.2 Tahun 2018 s.d. 2022



Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan atas layanan revisi anggaran mengalami tren kenaikan sejak tahun 2018. Jika dibandingkan dengan hasil survei pada Tahun 2021, terdapat kenaikan pada setiap kategori pada hasil survei tahun 2022. Kenaikan capaian persentase kinerja sasaran 3.4. yang sebesar 5,00% bisa dicapai karena adanya beberapa upaya yang telah dilakukan Biro Perencanaan dan Keuangan, antara lain:

- a. Menerbitkan memorandum Nomor: M.0073/Adm-1/02/2022 perihal Mekanisme Pengajuan Usulan Revisi Anggaran di Lingkungan Sekretariat

AKUNTABILITAS KINERJA

- Kabinet TA 2022, yang merupakan penyempurnaan dari memorandum yang telah diterbitkan pada tahun 2021 dengan Nomor: M.0062/Adm-1/01/2021.
- b. Menerbitkan memorandum Nomor: M.0085/Adm-1/02/2022 perihal Pelaksanaan Revisi DIPA Sekretariat Kabinet TA 2022, dalam rangka melakukan tertib administrasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan anggaran serta mempertahankan pencapaian Sekretariat Kabinet dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) TA 2022.
 - c. Menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran TA 2022 kepada PIC Revisi Anggaran di Lingkungan Sekretariat Kabinet dalam format fullboard meeting luar kota pada bulan Februari 2022.
 - d. Melakukan diseminasi videografis dan infografis Tata Cara Revisi Anggaran di Lingkungan Sekretariat Kabinet kepada para PIC Revisi Anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet.
 - e. Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja secara intensif, melalui media komunikasi seperti memorandum, email, telepon, sms, Whatsapp, maupun melalui penyelenggaraan rapat.
 - f. Menyelenggarakan rapat bersama unit kerja setelah ditemui adanya permintaan/permasalahan terkait revisi anggaran.
 - g. Merespon permintaan dan pertanyaan dari unit kerja dengan sigap dan detail walaupun sudah diluar jam kerja. Melayani sesuai dengan standard dan tulus

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja kedua pada sasaran tiga pada tahun 2022 telah dilaksanakan revisi anggaran selama 2022 yang menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran dan kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Berikut daftar unit kerja dan jumlah revisi anggaran berdasarkan kewenangannya.

Tabel 3.16
Revisi Anggaran Unit Kerja Tahun 2022

Unit Kerja	Kewenangan			Total	
	DJA	DJPb			
		Dit. PA	KANWIL		
AKRB	4			6	10
BIRUM	2			5	7
DKK1	4			5	9
DKK2	3			5	8
DKK3	3			5	8
DKK4	2			7	9
EKON1	3			6	9
EKON2	3			2	5
EKON3	2			3	5
EKON4	3			4	7
INSP	2			3	5
Jubir	2			0	2
MARVES1	2			2	4

AKUNTABILITAS KINERJA

Unit Kerja	Kewenangan				Total
	DJA	DJPb		KPA	
		Dit. PA	KANWIL		
MARVES2	3			2	5
MARVES3	3			2	5
MARVES4	2			4	6
PMK1	2			2	4
PMK2	4			3	7
PMK3	4			2	6
PMK4	3			4	7
POLHUKAM1	3			3	6
POLHUKAM2	2			4	6
POLHUKAM3	2			2	4
POLHUKAM4	2			4	6
PUSBINTER	3			4	7
PUSDATIN	2		1	3	6
RENKEU	3			7	10
SDMOT	5			7	12
Sespri	2			0	2
SETKAB (Pemukhiran Data & RPD)			6		6
SKP Amin	3			1	4
SKP Angkie	3			3	6
SKP Ari	2			1	3
SKP Arif Budi	2			3	5
SKP Ayu	2			3	5
SKP Billy	2			2	4
SKP Diaz	2			5	7
SKP Dini	2			1	3
SKP Putri	3			2	5
SKP Sukardi	2			1	3
SKWP Arif Rahman	2			2	4
SKWP Bambang	2			1	3
SKWP Imam	2			2	4
SKWP Lukmanul	2			1	3
SKWP Masduki	2			3	5
SKWP Masykuri	2			5	7
SKWP Nasir	2			1	3
SKWP Robikin	2			0	2
SKWP Satya	2			2	4
SKWP Sukri	2			1	3
Total	123	0	7	146	276

* Jumlah revisi termasuk didalamnya dalam rangka *Automatic Adjustment* dan Realokasi BA BUN

Adapun hasil inventarisasi saran berdasarkan hasil survei bulan Januari 2021 terkait permasalahan dalam pencapaian sasaran 3.2. adalah sebagai berikut:

AKUNTABILITAS KINERJA

- a. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pelatihan terkait perencanaan dan pelaksanaan revisi anggaran di tiap tahunnya.
- b. Format revisi anggaran agar dibuat lebih sederhana dan mudah dipahami.
- c. Memanfaatkan penyimpanan cloud dalam proses revisi anggaran agar mudah mengakses data.

Terkait saran tersebut, ditahun mendatang Biro Perencanaan dan Keuangan perlu melakukan beberapa hal antara lain:

- a. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan berbagi informasi perihal Tata Cara Revisi Anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet secara rutin setiap tahun.
- b. Meningkatkan diseminasi videografis dan infografis Tata Cara Revisi Anggaran di Lingkungan Sekretariat Kabinet.
- c. Mengadakan diskusi berkala dengan Person In Charge (PIC) Revisi Anggaran di unit kerja.
- d. Membuat format revisi dan data dukung yang lebih mudah agar proses penyusunan revisi bisa lebih cepat dilaksanakan.
- e. Memanfaatkan penyimpanan cloud dalam proses revisi anggaran agar mudah mengakses data.

Berikut uraian tentang akuntabilitas keuangan sasaran **“Meningkatnya Kualitas Pemantauan dan Evaluasi”** dilihat dari aspek persentase serapan, penghematan dana maupun efisiensi dan efektifitas penggunaannya.

Tabel 3.17

Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran Sasaran 3 Tahun 2022

No	% Realisasi Outcome	Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
1.	85,75%	Jumlah dokumen perencanaan program: 1. Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2021 2. Laporan eMonev Bappenas Tahun 2021	Output	Dok	6	6
			Input	Rupiah	488.108.000	487.784.870
			Input rata-rata per output	Rupiah	81.351.333	81.297.478

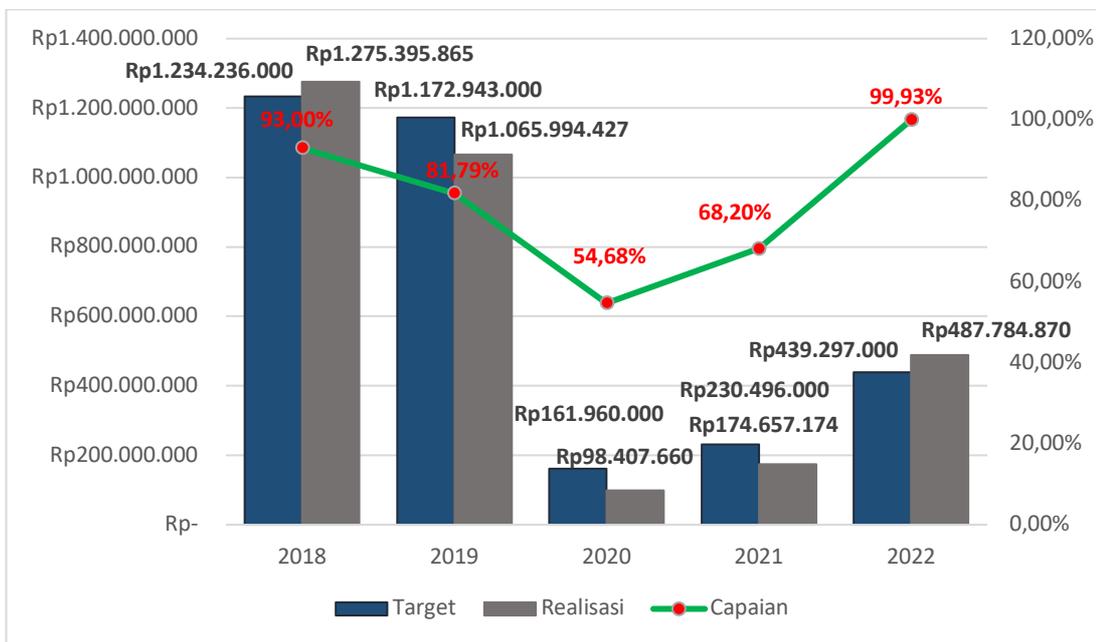
AKUNTABILITAS KINERJA

	3. Laporan SMART Tahun 2021				
	4. Laporan SMART Semester I Tahun 2022				
	5. Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Anggaran Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2022				
	6. Laporan Inventaris Revisi Anggaran TA 2022				
	1. Penghematan dana = Rp323.130(0,06%)				
	2. Efisiensi = Rp53.855(0,01%)				
	3. Efektivitas = % capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)				

Pencapaian sasaran 3 diwujudkan melalui kegiatan Pengeordinasian penyusunan, penelaahan, dan pembahasan dokumen perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet, dan output yang digunakan untuk mengukur efisiensi anggaran dari sasaran ini adalah Laporan Inventaris Revisi Anggaran TA 2022.

Proses kegiatan tersebut didukung anggaran sebesar Rp488.108.000,00 (pagu revisi) (input) dan terealisasi sebesar Rp487.784.870,00 atau 99,93% dari rencana pagu anggaran yang telah tersedia. Realisasi anggaran sebesar 99,93% ini diiringi dengan tercapainya seluruh output yang ditargetkan dapat tercapai. Realisasi anggaran tahun 2022 ini meningkat sebesar 29,76% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021. Kenaikan realisasi anggaran ini didukung dengan situasi pandemi Covid-19 yang berangsur pulih sehingga membuat koordinasi yang bersifat tatap muka dapat kembali dilakukan. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Sasaran 1 sepanjang 5 tahun terakhir (2018 sampai dengan 2022) dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.5
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran pada Sasaran 3
Tahun 2018-2022



*Acuan target berdasarkan Perdirjen Pb-PER_5_PB_2022 Juknis IKPA Belanja KL

Secara umum, capaian kinerja untuk indikator kinerja **“Tingkat Pemanfaatan Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran”** adalah sebesar 103,96% (Memuaskan), dihitung dari rata-rata realisasi dari tingkat kepuasan unit kerja di semester I dan II sebesar 83,16% dibagi dengan target 80% dan capaian kinerja untuk indikator kinerja **“Kepuasan Unit Kerja Terhadap Layanan Revisi Anggaran”** adalah sebesar 110,43% (Memuaskan), dihitung dari rata-rata realisasi dari tingkat kepuasan unit kerja di semester I dan II sebesar 88,35% dibagi dengan target 80%.

B. Analisis Penggunaan Sumber Daya

1. Realisasi Anggaran

Pagu yang diperjanjikan dalam PK Biro Perencanaan dan Keuangan pada periode tahun 2022 adalah sebesar Rp1.389.281.000,- Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran 1 sampai dengan 3 beserta realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18

Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2022

SASARAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	% REALISASI	% CAPAIAN KINERJA*
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program dan Anggaran					
Sasaran 1	500.000.000	356.003.000	349.306.655	98,12%	109,18%
Meningkatnya Kualitas Manajemen Keuangan					
Sasaran 2	500.000.000	545.170.000	545.093.378	99,99%	100,78%
Meningkatnya Kualitas Pemantauan dan Evaluasi					
Sasaran 3	500.000.000	488.108.000	487.784.870	99,93%	107,19%
TOTAL	1.500.000.000	1.389.281.000	1.382.184.903	99,49%	105,72%

*rata-rata capaian indikator kinerja masing-masing sasaran

Pagu setelah revisi terakhir adalah Rp1.389.281.000,-, sampai dengan 31 Desember 2022 penyerapan anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan adalah Rp1.382.184.903,- atau **99,49%**. Capaian anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2022 sudah optimal karena presentase penyerapannya sudah melebihi 90%. Selain itu, kinerja yang ditargetkan di awal tahun dapat dicapai dengan optimal, dapat dilihat dari capaian kinerja total sebesar **105,72%**. Persentase capaian kinerja total adalah rata-rata capaian seluruh indikator kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan. Capaian kinerja tersebut masuk ke dalam kategori **memuaskan**. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa dalam kondisi pandemi, Biro Perencanaan dan Keuangan masih dapat melakukan penyerapan anggaran yang baik dengan diiringi capaian kinerja yang memuaskan pada tahun 2022.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan. Jumlah pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan di tahun 2022 (termasuk pegawai tidak tetap) adalah sebanyak 30 orang dengan rincian selama tahun 2020-2022 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19

Sumber Daya Manusia Biro Perencanaan dan Keuangan

Jabatan	2020 Jan- Sep	2020 Okt- Des	2021 Jan	2021 Feb- Sept	2021 Okt- Des	2022
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	1	1	1	1	1	1
Kepala Bagian Perencanaan	1	1	1	1	1	1
Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi	1	1	1	1	1	1

AKUNTABILITAS KINERJA

Kepala Bagian Keuangan	1	1	1	1	1	-
Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya	-	-	-	-	-	1
Kepala Subbagian Program dan Anggaran I	1	1	1	1	1	1
Kepala Subbagian Program dan Anggaran II	1	1	1	1	1	1
Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I	1	1	1	1	1	1
Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II	1	-	-	-	1	1
Kepala Subbagian Verifikasi I	1	1	1	1	1	-
Kepala Subbagian Verifikasi II	1	1	1	1	1	-
Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1	1	1	1	1	-
Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda	-	-	-	-	-	3
Bendahara Pengeluaran	1	1	1	1	1	1
Analisis Perencanaan	1	-	2	2	-	-
Analisis Keuangan	5	5	3	5	5	5
Analisis Laporan Keuangan	2	1	1	1	1	1
Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	2	3	3	5	4	4
Analisis Data dan Informasi	1	1	1	2	2	2
Pengolah Data	4	4	2	2	2	2
Pegawai Tidak Tetap	4	4	4	4	4	4
Jumlah	31	29	27	32	30	30

BAB IV

PENUTUP

Biro Perencanaan dan Keuangan selalu berusaha melaksanakan kinerja secara optimal dengan bantuan sumber daya manusia yang dimiliki. Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan kepada Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet. Pada tahun 2022, Biro Perencanaan dan Keuangan meraih rata-rata capaian, berdasarkan capaian masing-masing indikator kinerja sasaran, sebesar **105,72%** dengan kategori **Memuaskan**. Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran ini juga telah diimbangi dengan capaian penyerapan anggaran yang optimal dalam mendukung pencapaian kinerja yaitu sebesar 99,49%.

Pada tahun yang akan datang, Biro Perencanaan dan Keuangan diharapkan dapat terus menyusun perencanaan anggaran yang komprehensif melalui pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja sehingga dapat dihasilkan penyerapan anggaran yang optimal dan capaian kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mendukung capaian kinerja Deputi Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet secara keseluruhan.

Langkah perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan adalah:

- 1 Perlu dibangun Sistem Informasi di Sekretariat Kabinet yang terintegrasi terkait perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi program, kegiatan dan anggaran.
- 2 Perlu adanya pengembangan aplikasi SIKT (Sistem Informasi Kinerja Terpadu) untuk dapat mengakomodir penginputan capaian kinerja sesuai rencana secara periodik setiap bulan, dan diintegrasikan dengan SIPT (Sistem Informasi Persuratan Terpadu) untuk menghitung capaian kinerja unit kerja secara tersistem sehingga proses penghitungan capaian kinerja anggaran bisa lebih cepat.

PENUTUP

- 3 Berkoordinasi dengan baik secara internal di Biro Perencanaan dan Keuangan maupun secara eksternal dengan seluruh unit kerja di Sekretariat Kabinet agar seluruh tugas dan fungsi dapat berjalan dengan lancar. Koordinasi dilakukan mulai dari tahap perencanaan dengan mengomunikasikan alur proses perencanaan, melakukan pendampingan, serta termasuk perlunya ditunjuk satu orang penanggungjawab dari tiap unit kerja untuk menangani pelaporan pelaksanaan anggaran dan revisi anggaran sehingga menjadi satu jalur dan memudahkan untuk monitoring.
- 4 Meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya di luar lingkungan Sekretariat Kabinet.
- 5 Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan lebih intensif kepada koordinator/penanggung jawab/Fasilitasi Operasional anggaran dan pelaksana teknis unit kerja terkait perencanaan program dan anggaran, pelaporan pelaksanaan anggaran dan kebijakan revisi anggaran.
- 6 Melaksanakan bimbingan teknis kepada para pengelola keuangan terkait penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
- 7 Melaksanakan diseminasi informasi ataupun ketentuan teknis terkait penyelesaian Surat Perintah Membayar (SPM) kepada para pengelola keuangan.
- 8 Menginformasikan kepada unit kerja tentang mekanisme pengajuan revisi anggaran beserta dokumen kelengkapan lainnya melalui memorandum sehingga terdapat kesamaan format dokumen pengajuan revisi oleh unit kerja.
- 9 Meningkatkan kapasitas/pengetahuan pegawai pada Biro Perencanaan dan Keuangan dengan mengikuti sosialisasi/bimtek terkait agar dapat memberikan pendampingan yang optimal kepada unit kerja terkait penyusunan perencanaan program dan anggaran serta pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas, sehingga dapat tepat sasaran dan bermanfaat oleh unit kerja.
- 10 Melakukan penyebarluasan informasi kepada unit kerja melalui Surat Edaran dan Memorandum.
- 11 Menyusun petunjuk teknis proses dan siklus penyusunan program dan anggaran.

PENUTUP

Berbagai upaya perbaikan tersebut memerlukan komitmen dan dukungan yang kuat baik dari pimpinan dan pegawai di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan. Upaya-upaya tersebut berguna untuk meningkatkan kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan. Pada akhirnya, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberi potret kondisi dan dimanfaatkan dalam membangun manajemen kinerja yang optimal di Biro Perencanaan dan Keuangan.

Lampiran I

PERJANJIAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN 2022



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Djaka Warsijanto, S.Sos., M.Ak.
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Farid Utomo, S.H., M.H.
Jabatan : Deputy Bidang Administrasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi

Farid Utomo, S.H., M.H.

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Djaka Warsijanto, S.Sos., M.Ak.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran	Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	78 Persen
2	Meningkatnya kualitas manajemen keuangan	Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 Persen
		Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Pembayaran yang diselesaikan secara akurat	96 Persen
3	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi	Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	80 Persen
		Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan revisi anggaran	80 Persen
4	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan	
1. Penyusunan Rencana Kerja Setkab	Rp145.863.000,-
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Kabinet	Rp354.137.000,-
3. Pelaksanaan revisi anggaran	Rp233.184.000,-
4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	Rp266.816.000,-
5. Penyusunan laporan keuangan	Rp223.567.000,-
6. Pengelolaan perbendaharaan	Rp276.433.000,-
Total Anggaran	Rp1.500.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi

Farid Utomo, S.H., M.H.

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Djaka Warsijanto, S.Sos., M.Ak.

Lampiran II

MATRIKS CAPAIAN KINERJA 2022

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	% Capaian	Kategori Pencapaian
Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran	Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	78%	109,18%	Memuaskan
Meningkatnya kualitas manajemen keuangan	Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	Memuaskan
	Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan secara akurat	96%	102%	Sangat Baik
Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi	Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	80%	103,96%	Memuaskan
	Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi anggaran	80%	114,43%	Memuaskan

Lampiran III

MATRIKS PENYERAPAN ANGGARAN

Deskripsi	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Sisa Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5=4÷3	6=3-4
Layanan Revisi Anggaran	233.184.000	262.250.000	262.105.000	99,94%	145.000
Layanan Perencanaan	500.000.000	356.003.000	349.306.655	98,12%	6.696.345
Layanan Manajemen Keuangan	500.000.000	545.170.000	545.093.378	99,99%	76.622
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	266.816.000	225.858.000	225.679.870	99,92%	178.130
TOTAL	1.500.000.000	1.389.281.000	1.382.184.903	99,49%	7.096.097

